

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan antar negara, kelompok negara, dan komunitas global, serta faktor-faktor yang membentuk kehidupan, pemikiran, dan tindakan masyarakat (Darmayadi, Mulyana, Triwahyuni, & Putri, 2015).

Interaksi antar negara, kelompok negara, dan komunitas global merupakan bagian dari hubungan internasional. Hubungan internasional mencakup lebih dari sekadar pertukaran politik dan ekonomi antar pemerintah namun hubungan internasional juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ideologi yang berdampak lebih luas pada kehidupan masyarakat. Dinamika hubungan internasional dibentuk oleh elemen-elemen seperti kepentingan nasional, ideologi politik, kebijakan luar negeri, konvensi internasional, dan kekuatan ekonomi.

Hubungan internasional, menurut Morgenthau, adalah hubungan kekuasaan antar negara. Morgenthau berpendapat bahwa politik adalah perebutan kekuasaan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara (Morgenthau, 2005).

Dapat ditarik kesimpulan melalui pandangan Morgenthau dalam memandang hubungan internasional sebagai pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan di antara negara-negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara yang memperkuat gagasan realisme dalam studi hubungan internasional, di mana pemerintah dianggap sebagai aktor yang berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan mereka.

Menurut Waltz, hubungan internasional adalah sebuah sistem internasional yang terdiri dari negara-negara yang saling berinteraksi. Setiap negara, menurutnya, memiliki tujuan nasional (kepentingan nasional) dan bertindak secara logis untuk mencapai tujuan tersebut (Waltz, 1979).

Dari sudut pandang Waltz ini menjelaskan hubungan internasional adalah sebuah sistem di mana negara-negara terlibat satu sama lain dengan tujuan nasional dan berperilaku secara logis untuk mencapainya. Teori ini menekankan pentingnya memahami kepentingan nasional sebagai alasan utama kebijakan dan tindakan negara dalam hubungan internasional.

Bull berpendapat bahwa hubungan internasional adalah sistem sosial internasional multi-aktor yang mencakup tidak hanya negara tetapi juga organisasi internasional, kelompok transnasional, dan individu. Bull juga menekankan adanya norma dan prinsip yang mengatur perilaku aktor-aktor tersebut dalam sistem internasional (Bull, 1977).

Penjelasan ini menunjukkan bagaimana perspektif Bull meluas dan tidak hanya mengandalkan negara sebagai aktor utama dalam urusan internasional. Bull mengakui peran penting yang dimainkan oleh organisasi internasional, kelompok transnasional, dan orang-orang dalam menentukan dinamika sistem internasional.

Hubungan internasional, menurut Nye, adalah sistem yang mendunia yang terdiri dari berbagai aspek seperti negara, organisasi internasional, bisnis, dan individu. Nye juga mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku pemain lain melalui daya tarik budaya dan cita-citanya (Jr., 2004).

Kutipan ini mencontohkan pendekatan Nye, yang mengakui kompleksitas hubungan internasional dengan memasukkan pemain non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan, dan individu. Pandangan ini menekankan bahwa kekuatan dalam hubungan internasional tidak hanya berasal dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari budaya, cita-cita, dan nilai-nilai suatu negara.

Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar negara dan aktor internasional lainnya dalam sebuah sistem internasional. Studi ini mengkaji berbagai topik seperti politik, ekonomi, masalah sosial, dan keamanan. Hubungan internasional memerlukan pembelajaran perspektif masing-masing negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara untuk meningkatkan kualitas hidup di negara lain.

Hubungan internasional, menurut Charles McClelland, adalah studi tentang interaksi antara tipe-tipe unit sosial tertentu, termasuk penelitian yang terkait dengan keadaan-keadaan penting yang melingkupi interaksi tersebut. Studi hubungan internasional bersifat dinamis, dan dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional. Aktor non-negara yang tindakannya memiliki pengaruh terhadap kewajiban negara juga dipelajari dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005).

Penjelasan ini menekankan pada luasnya cakupan dan kompleksitas penelitian hubungan internasional. Penjelasan ini berfokus pada berbagai elemen eksistensi manusia seperti politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Hubungan internasional berusaha untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan kualitas hidup di negara lain dengan mempelajari dan mengevaluasi sudut pandang dari berbagai pemain, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan aktor non-negara.

Hubungan internasional dimulai dengan studi tentang perang dan perdamaian dan kemudian berkembang menjadi studi tentang perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang terjadi dalam hubungan antar negara atau antar negara dalam konteks sistem global. Saat ini, hubungan internasional tidak hanya berfokus pada hubungan politik, yang juga dikenal sebagai "politik tingkat

tinggi", tetapi juga pada isu-isu seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme.

Interaksi antar negara merupakan konsep yang paling mendasar dalam hubungan internasional. Hubungan internasional terjadi tidak hanya melalui satu interaksi, tetapi melalui berbagai interaksi antar negara yang memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara (Perwita & Yani, 2005).

Evolusi dan kompleksitas studi hubungan internasional dari konsentrasi awal pada perang dan perdamaian menjadi subjek yang lebih besar dan lebih luas. Saat ini, memahami tren global yang mencakup berbagai topik terkait, seperti politik, ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan terorisme, merupakan bagian dari hubungan internasional.

Hubungan Internasional berusaha untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di seluruh dunia. Tujuan Hubungan Internasional, menurut Hans J. Morgenthau, adalah untuk mencapai perdamaian melalui kekuatan dan kebijakan luar negeri yang cerdas (smart power), tetapi Hedley Bull percaya bahwa tujuan Hubungan Internasional adalah untuk membangun masyarakat dunia yang damai dan teratur (Morgenthau, 2005).

Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat perbedaan dalam metode dan tujuan. Morgenthau menekankan perlunya kekuatan dan kebijakan luar negeri yang bijaksana dalam menciptakan perdamaian, sedangkan Bull menekankan perlunya membangun tatanan internasional yang didasarkan pada aturan dan prinsip. Terlepas dari teknik yang mereka gunakan, tujuan akhirnya adalah perdamaian dan keamanan dunia.

Hubungan Internasional berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional, mempromosikan perdamaian dan keamanan, dan mengelola konflik. Hubungan Internasional, menurut Martin Griffiths, berfungsi untuk memfasilitasi dialog, mengelola konflik, dan mempromosikan kerjasama internasional (Bull, 1977).

Hubungan internasional memiliki peran penting dalam mendukung perdamaian dan keamanan, serta resolusi konflik. Negara-negara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan mempertahankan stabilitas global melalui diplomasi, dialog, dan kerjasama internasional.

Aktor dalam Hubungan Internasional, menurut B. J. C. McKercher, adalah "individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam hubungan antar negara." Aktor negara dan aktor non-negara sama-sama merupakan aktor dalam hubungan internasional. Aktor negara adalah pemerintah atau negara, sedangkan aktor non-negara adalah organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan multinasional. Aktor non-negara menjadi semakin penting dalam hubungan internasional karena kemajuan teknologi dan komunikasi memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah (McKercher, 2012).

Pentingnya mengetahui peran dan kontribusi para aktor dalam hubungan internasional. Aktor negara dan non-negara sama-sama memiliki kekuatan dan pengaruh dalam menentukan dinamika hubungan internasional dalam situasi ini. Aktor non-negara lebih penting dalam mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah di era globalisasi dan inovasi teknologi yang memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Diplomasi, perdagangan internasional, dan kerjasama internasional merupakan contoh kegiatan dalam hubungan internasional.

Kegiatan Hubungan Internasional, menurut Joshua S. Goldstein, dapat dibagi menjadi empat kategori: penggunaan kekuatan, pembangunan, perdamaian, dan globalisasi. Sanksi militer dan ekonomi adalah contoh penggunaan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan negara lain. Bantuan asing, investasi asing, dan perdagangan semuanya berkontribusi pada pembangunan. Perdamaian mencakup kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik dan mendorong dialog antarnegara. Melalui hubungan internasional, globalisasi mencakup penyebaran ide, nilai, dan budaya (Goldstein & Pevenhouse, 2014).

Banyaknya tindakan yang terjadi dalam hubungan internasional dan kategorisasi mereka. Hal ini menggambarkan kompleksitas dan multidimensi

Hubungan Internasional sebagai subjek studi yang mencakup berbagai aspek kehidupan internasional, mulai dari penggunaan kekuatan hingga kolaborasi dan penyebaran ide.

Teori Hubungan Internasional berkaitan dengan interaksi dan dinamika negara-negara dalam sistem internasional. Teori Hubungan Internasional relevan dalam penelitian skripsi yang berjudul "Peran Strategis Indonesia dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan di ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)*" karena membahas mengenai peran Indonesia dalam mendorong kerja sama dan koordinasi di antara negara-negara ASEAN dalam mengembangkan energi terbarukan. Penelitian ini juga menyelidiki elemen-elemen yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di bidang energi terbarukan dan dampaknya terhadap hubungan regional ASEAN. Dalam konteks ini, teori Hubungan Internasional membantu dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia terkait energi terbarukan dalam konteks hubungan antarnegara ASEAN. Oleh karena itu, teori Hubungan Internasional menjadi sangat signifikan dan vital dalam mendukung analisis dan temuan penelitian skripsi ini.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional, menurut K.J. Holsti, adalah proses di mana dua atau lebih negara atau entitas internasional lainnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Holsti, 1992).

Kolaborasi internasional didefinisikan sebagai proses di mana negara-negara atau organisasi internasional berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi kesulitan bersama dan menciptakan hasil yang saling menguntungkan melalui kerja sama internasional.

Hal ini memerlukan kolaborasi, keterlibatan, dan pembagian tanggung jawab di antara negara-negara dalam berbagai disiplin ilmu.

Kerjasama internasional melibatkan negara-negara dalam berbagai tindakan terkoordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Kerjasama internasional, menurut Walter Mattli dan Ngaire Woods, adalah perencanaan dan koordinasi tindakan nasional untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan metode internasional (Mattli & Woods, 1999).

Negara-negara atau aktor internasional lainnya menggunakan perangkat internasional untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan dalam kerjasama internasional.

Konsep dan prinsip kerjasama internasional sangat penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat di antara negara-negara di seluruh dunia. Menurut Ann Florini, kerjasama internasional adalah proses di mana negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian beban, pengambilan keputusan kolaboratif, dan penyelesaian masalah bersama (Florini, 2000).

Sementara itu, prinsip-prinsip kerjasama internasional meliputi kemandirian, kesetaraan, keadilan, saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling pengertian.

Menurut Steinberg (2017), terdapat beberapa strategi kerja sama internasional yang dapat dilakukan, seperti kerja sama keamanan dalam menangani terorisme, kejahatan transnasional, dan bencana alam, kerja sama ekonomi dalam menangani terorisme, kejahatan transnasional, dan bencana alam, kerja sama lingkungan dalam menangani perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan sampah plastik, serta kerja sama budaya dalam menangani seksisme (Steinberg, 2017).

Strategi ini menyoroti nilai kerjasama global dalam memecahkan masalah seperti terorisme, kejahatan transnasional, bencana alam, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan sampah plastik, dan seksisme.

Strategi kerjasama internasional ini berfokus pada solusi yang melibatkan negara dan organisasi internasional.

Selain itu, menurut Fitriyanti (2019), banyak taktik lain yang dapat digunakan untuk membina kerjasama internasional, antara lain dengan menggunakan pendekatan dialogis, saling memahami kepentingan masing-masing, menciptakan trust atau kepercayaan antar negara, dan melakukan negosiasi yang baik dan transparan (Fitriyanti, 2019).

Penjelasan tersebut mencakup strategi untuk mempromosikan kolaborasi internasional. Hal ini mencakup teknik dialogis, pemahaman kepentingan bersama, membangun kepercayaan, dan melakukan diskusi yang transparan. Strategi-strategi ini sangat penting untuk membangun hubungan bilateral dan memastikan kolaborasi yang efektif.

Kerjasama antara negara dan aktor internasional dianggap penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan beragam. Menurut Widiyanto, isu-isu global yang semakin kompleks membutuhkan peningkatan upaya kerjasama di antara negara-negara dan para pemain internasional di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan (Widiyanto, 2018).

Meningkatnya kompleksitas tantangan global membutuhkan lebih banyak kolaborasi di antara negara-negara dan aktor-aktor internasional di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi masalah global dan menemukan jawaban yang efektif untuk kesulitan yang rumit saat ini.

Selain itu, kerjasama internasional dapat membantu negara kecil atau negara berkembang dalam mengatasi isu-isu yang sulit diatasi sendiri. Isu-isu global yang kompleks membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang substansial di antara negara-negara dan entitas internasional (Rini, 2018).

Kerjasama dapat berupa pertukaran informasi, sumber daya, keterampilan, dan pengalaman dalam mengatasi isu-isu global seperti terorisme, perdagangan manusia, bencana alam, dan perubahan iklim. Negara-negara dan para pemain

internasional dapat bekerja sama untuk menemukan jawaban dan memecahkan masalah global dengan cara yang lebih efektif dan efisien melalui kerja sama internasional. Hal ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran global.

Ada banyak kepentingan nasional dalam kerjasama internasional dari berbagai negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Alhasil, kerjasama ini muncul sebagai hasil dari upaya untuk membantu, bekerja sama, dan bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan di bidang filosofi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, atau keamanan suatu negara (Perwita & Yani, 2005).

Kerjasama internasional dapat terjadi jika kepentingan utama suatu aktor terpenuhi dan dapat pula berhenti jika kepentingan utama tersebut tidak terpenuhi. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan suatu negara untuk mencapai tujuan bersama.

Ada beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam kerjasama internasional. Pertama, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam politik internasional, melainkan menjadi komponen dalam jaringan pertukaran politik, militer, ekonomi, dan budaya dengan entitas ekonomi dan masyarakat sipil. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kepentingan negara-negara yang bersangkutan, tetapi oleh lembaga-lembaga internasional, karena organisasi internasional tidak hanya terlibat dalam memproses berbagai kepentingan negara anggotanya, tetapi juga memiliki kepentingannya sendiri (Goldstein & Pevenhouse, 2017).

Akibatnya, kolaborasi internasional menjadi sebuah keharusan bagi negara atau pemain internasional lainnya. Karena hubungan saling ketergantungan muncul di antara para pemain internasional atau negara yang bekerjasama dalam kerjasama internasional. Ketika kepentingan nasional suatu negara tidak dapat dipenuhi di dalam batas-batas negaranya sendiri, maka kerjasama internasional diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kerjasama internasional dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:

- a. *Kerjasama Bilateral*
Kerjasama antara dua negara disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama ini meliputi perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama budaya. Kerjasama ini menekankan pada sikap bersahabat, seperti menawarkan dukungan dalam bentuk pendanaan untuk fasilitas kegiatan atau pinjaman.
- b. *Kerjasama dalam Skala Multilateral*
Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dalam bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, keamanan, atau kesejahteraan sosial.
- c. *Kerjasama Regional*
Kerjasama regional hanya dilakukan oleh beberapa negara yang tergabung dalam satu kawasan, dan dapat melibatkan domain politik, ekonomi, atau keamanan (Baylis, Smith, & Owens, 2018).

Kemajuan globalisasi telah menghasilkan kemajuan kerjasama internasional. Meskipun sekarang hanya pemerintah dengan negara yang bekerja sama, pemain lain seperti organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat melakukan kerjasama internasional. Sebagai contoh, organisasi ASEAN bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk mengembangkan energi terbarukan di seluruh kawasan.

Gagasan Kerjasama Internasional juga relevan dengan penelitian skripsi yang berjudul "Peran Strategis Indonesia dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan di ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC)." Dalam konteks ini, gagasan Kerjasama Internasional menggambarkan bagaimana negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti energi terbarukan di kawasan ASEAN. Dalam skenario ini, Indonesia, sebagai anggota ASEAN, memainkan peran penting dalam mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan energi terbarukan yang diharapkan bahwa dengan *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC) sebagai referensi bersama, kolaborasi yang efektif dapat

dicapai dalam menyelesaikan hambatan dan masalah terkait pengembangan energi terbarukan di wilayah ASEAN. Oleh karena itu, Teori Kerjasama Internasional dapat digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian skripsi ini untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kerjasama internasional dalam pengembangan energi terbarukan di ASEAN melalui implementasi APAEC.

2.1.3 Organisasi Internasional

Dalam studi hubungan internasional, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa aktor hubungan internasional selain negara yang memiliki peran penting adalah organisasi internasional. Namun, dalam literature organisasi internasional ditemukan banyak istilah yang merujuk pada organisasi internasional namun dengan terminology atau istilah yang berbeda. Banyak juga pembelajar hubungan internasional yang terjebak dengan menyamaratakan konsep masyarakat internasional (international society), institusi internasional (international institution) dan organisasi internasional (international organization) (Triwahyuni, 2015).

Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dalam bentuk kerjasama yang lebih nyata dan terkoordinasi. Pada hakikatnya, lahirnya organisasi internasional ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional. Dalam mencapai tujuannya, sebuah organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, memastikan bahwa tujuan tersebut tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi internasional harus memiliki tujuan bagi para anggotanya selain untuk mencapai tujuannya. Organisasi internasional harus memiliki kesepakatan antara anggota dan organisasi internasional dalam menghasilkan suatu kesepakatan dari kerjasama antara kedua belah pihak yaitu *Intergovernmental Organization (IGO)* atau *Non-Governmental Organization*

(NGO), dalam menghasilkan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk kerjasama organisasi.

Clive Archer membagi organisasi internasional menjadi dua jenis berdasarkan keanggotaannya, yang pertama dilihat dari keanggotaannya, seperti International Governmental Organizations (IGO), yaitu organisasi internasional yang beranggotakan perwakilan negara, dan International Non-Governmental Organizations (INGO), yaitu organisasi internasional yang anggotanya tidak memiliki perwakilan pemerintah dengan mempertimbangkan ruang lingkup keanggotaan, seperti keanggotaan yang terbatas pada wilayah tertentu dan keanggotaan yang mencakup seluruh bagian dunia (Archer, 2014).

Taksonomi organisasi internasional yang dibuat oleh Clive Archer menekankan pentingnya membedakan antara IGO dan INGO dalam hal keanggotaan dan ruang lingkup. Hal ini menunjukkan keragaman pemain internasional serta kompleksitas interaksi internasional yang harus dipahami dengan baik dalam studi dan kolaborasi internasional.

Teuku May Rudy mengategorikan organisasi internasional berdasarkan peran, wewenang, dan otoritasnya. Wewenang yang dimiliki oleh sebuah organisasi tergantung pada fungsinya. Pengkategorian organisasi internasional merupakan upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan. Klasifikasi organisasi internasional didasarkan pada tujuan dan aktivitas mereka. Akibatnya, sebuah organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam lebih dari satu cara, tergantung pada komponen yang dipertimbangkan saat mengklasifikasikannya aspek yang dievaluasi dalam mengkategorikannya. Secara rinci, klasifikasi organisasi internasional didasarkan pada delapan faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Operasi administratif seperti organisasi internasional antarpemerintah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan Uni Eropa, dan INGO (International Non-Governmental Organization) yang anggotanya adalah kelompok swasta yang mengkhususkan diri dalam disiplin ilmu tertentu. Kelompok yang mengkhususkan diri pada disiplin ilmu tertentu, seperti Palang Merah Internasional atau Greenpeace.*
- b. Lingkup kegiatan dan keanggotaan, seperti organisasi internasional global seperti PBB, pendanaan OPEC NAM, dan organisasi internasional regional yang lingkup kegiatan dan keanggotaannya meliputi ASEAN (Asia Tenggara), APEC (Asia (Asia Tenggara dan Asia Pasifik), dan Uni Eropa (Eropa).*
- c. Bidang operasional organisasi, organisasi multinasional yang melakukan kegiatan operasional seperti International Chamber of Commerce (ICC) di*

bidang ekonomi, United Nations Environment Program (UNEP) di bidang lingkungan hidup, dan World Trade Organization di bidang perdagangan internasional (WTO).

- d. Tujuan dan luasnya bidang kegiatan organisasi, seperti organisasi internasional umum yang tujuan dan bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, dan tidak hanya menyangkut bidang-bidang tertentu saja, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional khusus, ketika kegiatan operasional organisasi terbatas pada bidang tertentu saja, seperti UNODC yang berkonsentrasi pada obat-obatan terlarang dan kejahatan internasional.*
- e. Lingkup dan lingkup tindakan, yang mencakup organisasi global-umum seperti PBB, organisasi global-khusus seperti OPEC dan ICAO, organisasi regional-umum seperti ASEAN dan Uni Eropa, dan organisasi regional-khusus seperti AIPO.*
- f. Tingkat otoritas, seperti organisasi supranasional dan koperasi.*
- g. Bentuk dan pola kerjasama, seperti kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan (collective security) yang dapat disebut sebagai "aliansi yang dilembagakan" seperti NATO dan SEATO, dan kerjasama fungsional (functional organization) seperti PBB, ASEAN, OKI, dan OPEC.*

Fungsi-fungsi Organisasi Internasional juga meliputi:

- a. Organisasi politik, yaitu organisasi yang meniru suatu kegiatan yang melibatkan masalah politik dalam hubungan internasional.*
- b. Organisasi administratif adalah organisasi yang menjalankan kegiatan teknis dalam kapasitas administratif.*
- c. Organisasi yudisial (Judicial organization) adalah organisasi kegiatan yang menggunakan prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik dalam beberapa aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) prosedur dan proses peradilan yang sesuai dengan aturan-aturan internasional atau perjanjian internasional. Perjanjian yang bersifat transnasional (Rudy, Administrasi & Organisasi Internasional, 2005).*

ASEAN sebagai organisasi regional, memainkan peran penting dalam memungkinkan kerjasama energi di antara negara-negara anggotanya dan mengimplementasikan APAEC yang mana teori Organisasi Internasional dapat diterapkan dalam penelitian skripsi ini. Peneliti dapat menggunakan teori Organisasi Internasional untuk meneliti struktur, tugas, dan fungsi ASEAN sebagai organisasi regional yang mempromosikan kolaborasi di bidang energi terbarukan. Peneliti dapat meneliti bagaimana ASEAN sebagai organisasi dapat membantu

koordinasi dan kolaborasi di antara negara-negara anggotanya dalam pengembangan energi terbarukan, serta bagaimana prosedur pengambilan keputusan ASEAN mempengaruhi implementasi APAEC.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Aspek-aspek dalam hubungan internasional yang saling berkaitan satu sama lain dan berkontribusi dalam evolusi hubungan internasional, seperti aktor (*actors*), kepentingan (*interests*), dan kekuasaan (*power*). Hal inilah yang menyebabkan hubungan internasional sering dikaitkan dengan kepentingan nasional atau *national interest*, karena pola interaksi yang terjadi tidak dapat menghindarkan diri dari kepentingan nasional dari masing-masing partisipan yang terlibat dalam interaksi tersebut. Terbentuknya kepentingan nasional dilandasi oleh keragaman masing-masing negara yang terbatas dan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Karakter, budaya, sejarah, sumber daya, dan faktor-faktor lain semuanya berdampak pada hal ini. Ada empat kategori kepentingan nasional yaitu ideologi, keamanan, ekonomi, dan prestise.

Menurut Hans J Morgenthau, orang pertama yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional, kepentingan nasional adalah sarana untuk mendapatkan dan mencari kekuasaan karena kekuasaan memungkinkan suatu negara untuk mengatur negara lain. Menurut Morgenthau, pengertian kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan menjaga identitas fisik, politik, dan budayanya, yang tentu saja bebas dari campur tangan negara lain (Morgenthau, 1948).

Salah satu bentuk kepentingan nasional adalah hubungan diplomatik yang baik antar negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk pembangunan berkelanjutan, inisiatif pemerintah, kerjasama internasional, dan sebagainya. Kepentingan nasional merupakan hal yang sangat penting dalam

keberlangsungan hubungan internasional, karena kepentingan nasional merupakan bagian dari hubungan internasional yang fungsinya tidak lain adalah untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi suatu negara melalui berbagai sektor dan bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial-budaya, dan lain sebagainya.

Kepentingan nasional, menurut buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" karya Wijatmadja, dapat dicirikan dengan berbagai macam faktor. Yang pertama adalah kriteria ekonomi yang mencakup inisiatif yang meningkatkan kedudukan ekonomi negara. Jenis kriteria kedua adalah kriteria ideologi yang mempengaruhi cara negara dalam memandang dunia dan menentukan kepentingan nasionalnya. Kriteria ketiga adalah keamanan militer di mana negara menganggap keamanan militer sebagai penentu kepentingan nasionalnya karena keamanan militer (kekuatan) memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Faktor keempat adalah moralitas dan legalitas, yang merupakan topik yang sering dibicarakan dalam menilai kepentingan nasional. Kategori kelima adalah kriteria lainnya, yang mencakup masalah budaya, etnis, ras, dan lainnya (Ambarwati & Wijatmadja, 2016).

Faktor ekonomi, ideologi, keamanan militer, moralitas, dan variabel-variabel lain semuanya mempengaruhi kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Di antara kriteria ini adalah upaya untuk meningkatkan posisi ekonomi, perspektif ideologi, keamanan militer, moralitas dan legalitas, serta masalah budaya dan lainnya.

Memahami perilaku luar negeri suatu negara didasarkan pada gagasan kepentingan nasional. Pengejaran kekuasaan oleh suatu negara untuk mendapatkan kendali atas negara lain disebut sebagai kepentingan nasional. Donald E. Nuechterlin menawarkan empat macam aspek kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, tatanan internasional, dan yang terakhir adalah kepentingan ideologi.

Kepentingan nasional didefinisikan oleh Hans J Morgenthau (1948) sebagai kekuatan (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari campur tangan negara lain. Dari evaluasi tersebut, pemimpin suatu negara dapat membuat kebijakan tertentu terhadap negara dan negara bagian lain, baik yang bersifat kooperatif maupun konflikual.

Kepentingan nasional juga merupakan tujuan utama yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional sering kali merupakan faktor-faktor yang terdiri dari tuntutan-tuntutan yang paling penting bagi sebuah negara, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, kepentingan nasional merupakan tolok ukur atau kriteria utama bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) di negara manapun sebelum membuat dan menentukan sikap atau tindakan. Pada kenyataannya, setiap langkah politik luar negeri haruslah dilandasi oleh kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai dan melindungi apa yang didefinisikan atau dilabeli sebagai kepentingan nasional.

Kebutuhan suatu negara membentuk kepentingan nasional. Kepentingan ini terlihat dari kondisi internalnya, yang meliputi faktor politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari oleh keinginan untuk menghasilkan 'kekuatan' sehingga negara dapat memiliki pengaruh langsung terhadap pertimbangan negara tersebut untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dalam kepentingan nasional, fungsi 'negara' sebagai pengambil keputusan yang

berdampak pada masyarakat domestik dan memainkan peran penting dalam hubungan internasional.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti (1988), gagasan tentang kepentingan nasional dapat digambarkan secara minimum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional. Namun kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam negara yang menghadapi kondisi yang berlain-lainan tersebut. Kepentingan nasional itu dapat diklasifikasikan kedalam tiga klasifikasi. Pertama, *core values*, sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Kedua, *middle range objectives*, biasanya menyangkut tentang peningkatan derajat perekonomian suatu negara, dan yang ketiga *long range goals* yaitu yang bersifat ideal misalnya, keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Lingkungan eksternal atau di luar negara yang mempengaruhi para pemain di dalam negara dalam proses pengambilan keputusan dicirikan sebagai sumber-sumber sistemik. Hal ini mencakup keberadaan sistem, aturan, aliansi, koalisi, dan ikatan antar negara dalam konteks global dan regional. Lingkungan internal masyarakat meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, terutama organisasi massa, LSM, asosiasi, komunitas, aktivis, dan berbagai gerakan non-pemerintah yang secara terus menerus berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Sumber-sumber pemerintah adalah lingkungan internal organisasi pemerintah yang terdiri dari organ, lembaga, dan unit kerja seperti kementerian/lembaga, partai politik, parlemen, dan kementerian, yang kesemuanya bertujuan untuk berpartisipasi dalam sistem pengambilan keputusan setiap saat (Subagyo & Primawanti, 2022).

Kepentingan nasional penting bagi suatu negara karena terkait dengan kelangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya, sebuah negara harus mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari gangguan

eksternal. Selain itu, negara juga berkepentingan untuk menjaga integritas teritorial sebagai lokasi badan politik. Keberadaan negara dan cita-cita yang mendasari yang menentukan identitas kebijakan luar negerinya biasanya merupakan kepentingan nasional yang vital. Dengan demikian, kepentingan nasional merupakan ide vital dalam semua kebijakan yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain, serta merupakan tujuan jangka panjang. Sebagai tujuan umum, sebuah negara akan terus bertindak.

Menurut Teori Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang beragam dan lebih memilih untuk memprioritaskan kepentingan nasionalnya dalam setiap kerjasama internasional. Relevansi teori ini dengan penelitian skripsi yang berjudul "Peran Strategis Indonesia dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan di ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)*" bermula dari kepentingan nasional Indonesia dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan di kawasan ASEAN. Dalam skenario ini, Indonesia bercita-cita untuk memainkan peran strategis dalam mempromosikan dan mendukung kolaborasi di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan energi terbarukan melalui APAEC, yang memungkinkan Indonesia untuk memenuhi tujuan nasionalnya sekaligus memajukan kawasan ASEAN secara keseluruhan. Dengan demikian, teori Kepentingan Nasional dapat membantu dalam memahami motivasi di balik upaya Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam mempromosikan pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN melalui APAEC.

2.1.5 Pembangunan Berkelanjutan

Isu tentang pembangunan berkelanjutan diperdebatkan di setiap bidang, tetapi ekonomi menjadikannya sebagai kekhawatiran utama untuk pertumbuhan masa depan (Hanh & Knoke, 2010).

Pembangunan didefinisikan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan sumber daya negara secara cerdas. Gagasan pembangunan berkelanjutan merupakan sintesis dari empat teori pembangunan, yaitu, teori pembangunan berimbang yang menekankan pada keseimbangan sosial pertanian, pertambangan, industri, dan sebagainya. Filosofi pembangunan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Teori pemerataan yang berfokus pada distribusi pendapatan dan penghapusan ketidakadilan. Dan teori pembangunan kualitas, yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan dan manusia untuk mencapai kualitas hidup (Hall, 2001).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sangat penting untuk menyadari kompleksitas dan multidimensi dari masalah ini, yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita dapat mengembangkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan dengan mengintegrasikan berbagai teori pembangunan seperti teori pembangunan yang seimbang, pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan, dan kualitas, yang menjadi dasar bagi masa depan yang berkelanjutan bagi komunitas global.

The World Commission on Environment and Development (WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kesempatan yang sama bagi generasi mendatang untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti saat ini" (Hanh & Knoke, 2010).

Penjelasan tersebut menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kesempatan yang adil bagi generasi mendatang. Konsep ini menekankan pada gagasan tentang akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang untuk memastikan keberlanjutan di masa depan.

Awal mula dari konsep ini terkait erat dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Para delegasi KTT memutuskan untuk mendeskripsikannya pada saat itu sebagai pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui penggunaan sumber daya alam secara cerdas dan efisien, sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan penggunaannya untuk generasi sekarang dan yang akan datang (Moon, 2015).

Gagasan pembangunan berkelanjutan yang muncul pada KTT Bumi di Rio tahun 1992, mencerminkan kebijakan dunia untuk mencapai keseimbangan antara melayani kebutuhan manusia dan melindungi sumber daya alam. Gagasan ini telah menjadi pedoman penting dalam upaya kami untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk generasi mendatang dengan penekanan pada keberlanjutan jangka panjang.

Menurut Beker dan Elliot (2006), pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma kebijakan yang menonjol baik di tingkat dunia maupun nasional selama 20 tahun terakhir. Menurut Krysiak (2009), topik ini telah menjadi sumber kekhawatiran dan panduan di sektor korporat (Hanh & Knoke, 2010).

Pembangunan berkelanjutan telah berkembang menjadi paradigma fundamental dalam politik global dan nasional selama dua dekade terakhir, serta menjadi perhatian utama di kalangan bisnis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran umum dalam pemahaman akan pentingnya bertindak secara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan bagi semua instrumen.

Kebutuhan dan kendala dasar manusia merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan. Ketika kebutuhan manusia harus dipenuhi, namun alam menyediakan kebutuhan manusia dengan cara yang terbatas, maka manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin (Moon, 2015).

Pernyataan ini menekankan bahwa prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah menyediakan kebutuhan dasar manusia dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan perlunya manusia mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas namun sangat penting.

Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk fakta bahwa proses pembangunan harus berkelanjutan. Semakin tinggi kualitas lingkungan, semakin tinggi pula kualitas hidup. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui digunakan semurah mungkin, sementara sumber daya alternatif dieksplorasi. Kemajuan yang dilakukan memungkinkan kesejahteraan generasi saat ini dapat ditingkatkan tanpa membatasi kesempatan generasi mendatang (Moon, 2015).

Pembangunan berkelanjutan adalah gagasan utama yang harus ditangani untuk meningkatkan kualitas hidup saat ini tanpa membahayakan generasi mendatang. Kita dapat memberikan dasar yang kuat untuk keberlanjutan dan kemakmuran bagi generasi mendatang dengan menekankan perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang efektif, dan studi tentang alternatif yang berkelanjutan.

Generasi mendatang dapat berpartisipasi dalam keputusan kebijakan saat ini berkat hubungan antara praktik pengelolaan hutan dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga mereka memiliki kemungkinan yang sama untuk memanfaatkan hutan seperti generasi saat ini (Hanh & Knoke, 2010).

Kita dapat memberikan kesempatan yang adil bagi generasi mendatang untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan yang mempengaruhi masa depan sumber daya hutan dengan menekankan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan saat ini. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan hutan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh generasi sekarang, sehingga sumber daya alam ini dapat terus berlanjut untuk generasi mendatang.

Pembangunan hutan yang berkelanjutan membutuhkan pelestarian hutan dari ekosistem yang ada agar manfaat hutan dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Dimana hutan tidak hanya dimanfaatkan secara optimal tetapi juga dijaga kelestariannya. Sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan menambah nilai ekonomi, membantu masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan melestarikan potensi sumber daya alamnya. Hal ini merupakan representasi dari tujuan pembangunan kehutanan Indonesia, yaitu pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (Ishak, 2003).

Pembangunan hutan lestari lebih dari sekadar memberikan keuntungan ekonomi saat ini, namun juga merupakan komitmen untuk melindungi kekayaan alam ini untuk generasi mendatang. Sesuai dengan tujuan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti nilai ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian potensi sumber daya alam dengan melindungi hutan.

Penelitian yang berjudul "Peran Strategis Indonesia dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan di ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)*" sangat relevan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan. Teori ini memberikan kerangka kerja yang tepat untuk memahami upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN. Penelitian ini dapat mengevaluasi kemajuan Indonesia dalam mengimplementasikan APAEC dan memeriksa kebijakan, serta variabel penghambat dan pendorong yang berdampak pada implementasi kebijakan energi terbarukan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi di kawasan ASEAN dengan memanfaatkan Teori Pembangunan Berkelanjutan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan untuk

memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan di ASEAN.

2.2 Kerangka Pemikiran

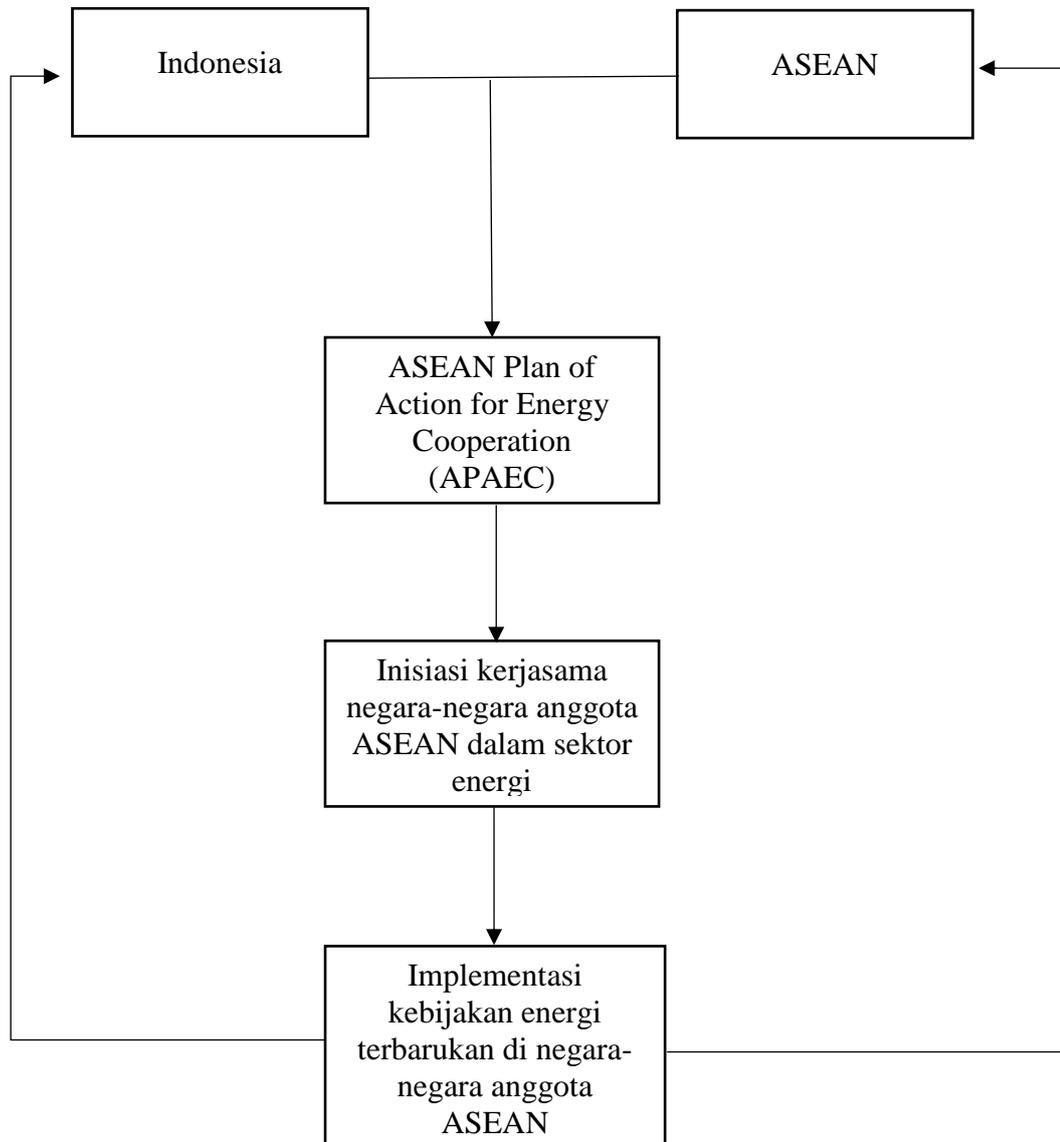
Kerangka pemikiran pada dasarnya adalah susunan seluruh variable atau segala sesuatu yang nantinya membantu memberikan alur penjelasan yang baik dan benar dari sebuah penelitian. Sedangkan dalam karya tulis umum, seperti tulisan non ilmiah, Kerangka pemikiran di dalamnya terdapat seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam karya tulis yang dibuat. Mulai dari pengenalan, lalu penyebab konflik, kemudian proses menyelesaikan konflik, dan bagian ending atau penutup. Semua dicantumkan di dalam kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran kemudian penjelasannya dapat digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir. Sehingga, kerangka pemikiran diartikan juga sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Pada penelitian saat ini, kerangka pemikiran memiliki konstruk penjelasan dimana ASEAN memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama di bidang energi surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Potensi energi terbarukan yang sangat besar ini dapat digunakan untuk mendorong keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan negara-negara anggota ASEAN pada bahan bakar fosil. Pengembangan energi terbarukan di ASEAN menghadapi sejumlah masalah, termasuk ketergantungan yang besar pada bahan bakar fosil, kurangnya infrastruktur dan teknologi yang sesuai, serta peraturan dan kebijakan yang tidak

sepenuhnya mendukung pertumbuhan energi terbarukan. Selain itu, perbedaan dalam undang-undang dan peraturan di seluruh negara anggota ASEAN dapat menghambat pertumbuhan energi terbarukan yang terintegrasi di kawasan.

ASEAN telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan hingga mencapai 23% dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Upaya ini mencakup berbagai inisiatif dan regulasi untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan, termasuk pengembangan sumber energi seperti angin, matahari, biomassa, hidro, dan panas bumi, serta infrastruktur energi terbarukan yang mendukungnya. Indonesia, sebagai pemain utama dalam ASEAN, memiliki peran sentral dalam menggerakkan pertumbuhan energi terbarukan di kawasan ini. Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam program-program regional seperti ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation. Dengan potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah, Indonesia melihat prospek pengembangan energi terbarukan di ASEAN sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi regional dan berkontribusi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan maka kerangka penelitian mengenai “Peran Strategis Indonesia dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan di ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation*” digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh pribadi